

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN
AYAM PEDAGING DI DESA BANARAN KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

Abstrak

Choiriyah, Atik. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag.

Kata Kunci/keyword: kerjasama, *qard*.

Kajian dalam skripsi ini dilatar belakangi kegiatan kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kerjasama ini terjadi antara peternak Desa Banaran dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Dengan adanya kerjasama bermitra ini memunculkan hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain dalam hal akad modal, tata cara penghitungan modal, syarat penjualan hasil dari pemeliharaan ayam tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemodal dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penghitungan nilai modal dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) bentuk modal dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan pulung Kabupaten Ponorogo ini sah, karena telah memenuhi syarat dan unsur pada akad *qard*. (2) tata cara penghitungan modal antara PT.BAS dengan peternak di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo adalah sah menurut hukum Islam, karena dalam pengambilan kembali modal PT.BAS mengambil sesuai dengan yang mereka pinjamkan untuk modal diawal kontrak. (3) sedangkan mengenai syarat hasil penjualan yang harus dijual kembali pada PT.BAS, sudah sah menurut hukum Islam karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kontrak dan juga atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung akad riba yang menguntungkan salah satu pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atik Choiriyah
NIM : 210216033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam
Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 17 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. M. Abidhan, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag.
NIP 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atik Choiriyah
 Nim : 210216033
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Ayam
 Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten
 Ponorogo



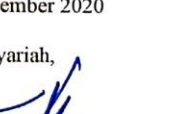
Dan telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 08 Desember 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr Drs. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag ()



Ponorogo, 08 Desember 2020
 Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atik Choiriyah
NIM : 210216033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa
Banaran Kecaatan Pulung Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2020

Penulis



Atik Choiriyah

210216033

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Choiriyah

NIM : 210216033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 November 2020

Yang membuat pernyataan



Atik Choiriyah
210216033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dalam kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal.

Di sisi lain manusia juga berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau *akad*.¹ Islam juga mendasari muamalah atas dasar rela sama rela. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling rela.

Masalah muamalah merupakan masalah yang melibatkan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Entah untuk bermuamalah secara individu maupun kelompok atau perusahaan, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan karakter saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pedoman-pedoman dan tatanannya dipelajari dan diterapkan dengan baik agar tidak terjadi

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 1.

penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia.²

Hukum pokok muamalah adalah kebolehan, oleh karena itu sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang. Cara yang ditempuh dalam mengetahui hukum bidang muamalah adalah penelusuran dalil, Al-Qur'an, hadist, dan pandangan ulama (ijtihad). Dalam bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.

Upaya untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan, baik dalam bentuk eksploitasi, monopoli, pemerasan maupun bentuk kecurangan lain, tidak dibenarkan oleh Islam karena bertentangan dengan syariat Islam.³

Sistem kemitraan merupakan kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kerjasama merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan akad kerjasama sudah mulai banyak dilakukan masyarakat Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Salah satu akad kerjasama yang mereka

² Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 49.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 97.

lalukan adalah kerjasama dalam pemeliharaan ayam pedaging antara peternak di Desa Banaran dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa).

Ayam pedaging merupakan jenis broiler biasa disebut dengan ayam ras pedaging jenis ras unggulan. Hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktifitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam pedaging merupakan hasil perkawinan silang dan sistem yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberikan faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan yang baik.⁴

Secara teori fiqh, kemitraan ini pelaksanaannya termasuk dalam akad *qard*, dikarenakan adanya modal dan tenaga pengelolaan yang berasal dari kedua belah pihak, dan terdapat jual beli di dalamnya. Para peternak melakukan akad kerja sama dengan beberapa PT yang menawarkan modal dan pemeliharaan ayam pedaging. Diantaranya PT yang bekerjasama dengan peternak di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yaitu PT.BAS. Sehingga dalam kerjasama ini masyarakat yang bertindak sebagai peternak akan berkewajiban atas penyediaan kandang serta jasa pemeliharaan ayam pedaging tersebut.

Dalam kerjasama ini pihak PT, akan memenuhi segala kebutuhan untuk pemeliharaan ayam pedaging mulai dari bibit ayam, pakan, vaksin,

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/ayambroiler>, diakses pada tanggal 10 februari 2020 pukul 19.25 WIB.

dan obat-obatan. Namun nantinya ayam tersebut harus dijual kembali pada PT yang bekerja sama dengan peternak tersebut, dalam hal ini PT.BAS yang bekerjasama dengan peternak di Desa Banaran. Bisa dikatakan bahwa kerjasama mereka adalah atas dasar penghutangan modal, atau pemebrian modal dengan pembayaran tunda, yaitu ketika panen ayam tiba.

Pada saat panen tiba, maka peternak harus menjual hasil panen nya kembali pada PT.BAS, sehingga bisa dikatakan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama bersyarat. Yang kemudian hasil penjualan akan diambil hasilnya oleh PT.BAS senilai modal yang telah dikeluarkan, yang jika harga dipasaran harga tinggi maka akan kembali pada peternak sebesar 30%.

Di dalam kontrak ini juga dijelaskan perihal harga kontrak ayam, yaitu dengan harga Rp. 18.600,-. Dimana harga tersebut adalah harga jual ayam peternak terhadap PT yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang mengalami kenaikan maupun penurunan.⁵ Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan salah satu pihak.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.**

⁵ Katemun, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemodalannya dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penghitungan modal dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad permodalan dari pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penghitungan modal dalam pemeliharaan ayam pedaging yang Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai pengembangan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli yang difokuskan pada kerjasama pemeliharaan ayam pedaging.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti dalam memahami sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang diharapkan juga dapat di gunakan untuk referensi dan evaluasi sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis Cokorda Bagus Dharma Putra Mahardika dengan judul “*pemberdayaan peternak ayam ras pedaging sistem kemitraan dengan penguatan komitmen kerjasama inti-plasma*”

dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa dalam kemitraan usaha ayam ras pada dasarnya merupakan kerjasama antar pihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan ketergantungan.

Namun dalam praktiknya, peternak sebagai plasma lebih cenderung dirugikan posisinya karena tidak berdaya menghadapi “kedigdayaan” pihak inti. Untuk memberdayakan peternak, perlu dukungan dari stakeholder untuk menguatkan komitmen kerjasama inti-plasma.

Pemerintah perlu mengupayakan regulasi agar penguatan komitmen memiliki payung hukum yang jelas, seperti penentuan harga acuan sapronak dan output, pendampingan terpadu, kredit dan asuransi untuk usaha agribisnis ayam ras.

Penguatan komitmen dilakukan agar peternak lebih mudah mengakses aspek pendukung bisnis ayam ras agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada inti. Dengan dukungan dari semua pihak, peternak akan semakin percaya diri dan mampu mandiri dalam berusaha tani sehingga tercapainya pemberdayaan itu sendiri.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sinollah dengan judul “*model pola kemitraan usaha peternakan ayam pedaging di kabupaten malang*” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sasaran dari penelitian tersebut adalah peternak plasma dari PT.NUJ. pengambilan sample dilakukan berdasarkan skala usaha dan jumlah sampel pada tiap skala usaha ditentukan secara

⁶ Cokorda Bagus Dharma Putra Mahardika “Pemberdayaan Peternak Ayam Ras Pedaging Sistem Kemitraan Dengan Penguatan Komitmen Kerjasama Inti-Plasma” Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

sengaja. Jumlah sampel diambil sebanyak 30 responden dari 183 peternak.

Pengambilan data dilakukan dengan metode survey. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari PT.NUJ dan peternakan plasma melalui wawancara dengan bantuan daftar pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari biro pusat statistik kabupaten malang dan dinas peternakan kabupaten malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pola kemitraan di PT.NUJ merupakan pola kemitraan plasma inti. PT.NUJ berperan sebagai inti yang bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi berupa pakan, doc, dan obat-obatan serta bimbingan teknis dan pemasaran. Peternakan rakyat berperan sebagai plasma yang bertanggung jawab dalam proses produksi. Pendapatan peternak per seribu ekor pemeliharaan dan perkilogram hasil panen sebesar 388027,65 rupiah dan 429,60 rupiah.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syahir Alhasani dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus Di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Dengan Peternak Plasma)*" dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip mirip dengan *qard mudharabah mutlaqah*, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja.

⁷ Sinollah "model pola kemitraan usaha peternakan ayam pedaging di kabupaten malang" Jurnal Manajemen Agribisnis Vol.11 No.3 Juli 2011.

Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Praktik kerjasama ternak ayam ini menurut syari'at Islam hukumnya *fasid* atau batal, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam pembagian keuntungan, pihak perusahaan mengetahui jumlah laba dari peternak, akan tetapi peternak tidak mengetahui berapa jumlah laba yang didapatkan perusahaan. Dan dalam pembagian kerugian memberatkan salah satu pihak. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung risiko yang diakibatkan oleh kematian ayam.⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Huda Sholikin WS dengan judul “*Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler Di Peternakan UD Hadi PS Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, sistem pemeliharaan yang digunakan adalah sistem “*all in all out*” yang memudahkan dalam masuknya DOC dan pada waktu panen secara bersama-sama dengan rata-rata bobot badan/ekor saat panen adalah 2,1 kg.

Pakan yang dihabiskan selama satu periode adalah 284 karung untuk 4.000 ekor ayam atau 150 gram/ekor/hari dan konversi pakan sebesar 1,69. Jumlah ayam yang mati sebanyak 164 ekor atau 4% disebabkan penyakit dan juga stres, serta total bobot ayam yang dihasilkan adalah 8349 kg untuk 3938 ekor ayam, yang dihargai Rp.11.500/kg.⁹

⁸ Ahmad Syahir Alhasani “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus Di Pt Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Dengan Peternak Plasma)*” Skripsi: (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

⁹ Huda Solikin WS “*Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler Di Peternakan UD Hadi PS Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo*” Skripsi: (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, kerjasama antara peternak yang ada di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan beberapa PT, diantaranya PT. Tabassam, PT. Malindo, PT. Mustika Karya adalah sah menurut hukum Islam dan termasuk dalam akad *shirkah*, karena pada masing-masing PT, membagi keuntungan berdasarkan proporsi modal yang mereka keluarkan selama periode kerjasama terjadi, dan atas kerelaan kedua belah pihak, serta telah memenuhi rukun dan syaratnya akad *shirkah*.

Mengenai penanggungungan risiko kerjasama antara peternak dengan PT. Malindo belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak saja tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah penyebab ayam mati karena faktor alam atau murni kesalahan atau kelalaian peternak, padahal risiko seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak sebagai pemilik porsi modal terbesar.

Sedangkan untuk PT. Tabassam dan PT. Mustika Karya sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ayam yang mati dikonfirmasi lebih lanjut. Jika memang murni kesalahan atau kelalaian peternak maka peternak yang harus bertanggung jawab, sedangkan jika penyebab ayam

yang mati berasal dari faktor alam maka akan ditanggung oleh pihak PT sebagai pemilik modal terbesar.¹⁰

Di skripsi peneliti membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang baru dilakukan beberapa tahun belakangan ini atau merupakan sistem kerjasama yang baru, sehingga memiliki perbedaan dengan telaah terdahulu yang membahas tentang kerjasama pemeliharaan ayam pedaging dengan sistem plasma-inti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan

¹⁰ Tri Ayu Wahyu Ningsih “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” Skripsi: (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dari partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks kemudian dianalisis dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmiah lain yang dibuat sebelumnya.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Ini karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan mengamati aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data yang jelas dan akurat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan bahwa perekonomian masyarakat Desa Banaran sudah mulai berkembang terutama pada bidang peternakan. Salah satunya yaitu peternakan ayam pedaging yang sudah mulai berkembang sejak tahun 2018 dan saat ini jumlah peternak semakin bertambah.

4. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Conny r. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.

- a. Data-data yang berkaitan dengan fakta yang diketahui penulis berkaitan dengan modal, penentuan bagi hasil, serta penanggung-an risiko pada kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- b. Data-data yang berkaitan dengan keterangan dan fakta yang diperoleh dari pemilik peternakan yang berkaitan dengan modal, penentuan bagi hasil, serta penanggung-an risiko.
- c. Sumber data yang berasal dari masyarakat yang khususnya menjalankan praktik hutang piutang dengan cara pemeliharaan ayam pedaging, perangkat desa, serta dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹²

¹² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹³

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik peternakan di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

c. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara.¹⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan datadan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif,

¹⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi peneliti ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 267.

Bab kedua, menjelaskan mengenai ketentuan umum dari konsep *qard* menurut hukum Islam, yang mana meliputi pengertian, dasar hukum *qard*, struktur akad *qard*, konsekuensi akad *qard*, serta manfaat dari akad *qard*.

Bab ketiga, Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum Desa dan khusus mengenai sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang menjelaskan mulai dari letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan, akad permodalan, tata cara penghitungan modal serta syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, Pada bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara lain analisis akad permodalan, tata cara penghitungan modal, serta syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan skripsi tersebut.



BAB II

QARD MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Qard*

Qard segi bahasa diambil dari bahasa arab yang artinya adalah pemotongan. Termasuk gunting dalam bahasa arab *miqradh* (alat memotong). Seakan-akan hutang adalah sebageaian dari harta kita yang kita potong untuk kita berikan kepada orang lain. *Qard* juga dapat diartikan sebagai memberikan pinjaman.¹

Qard merupakan bentuk *masdar* dari kalimat *qarada ash-shai' yariduhu*, yang berarti memutuskan. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qard* secara istilahnya merupakan akad pinjaman hartakepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.² *Qard* secara etimologi merupakan pinjaman hutang atau bisa juga berarti memberikan pinjaman hutang. Sedangkan secara terminologi *qard* merupakan memberikan kepemilikan suatu harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.³

Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga didalamnya. Dengan demikian utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menurut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.

¹ M. Pujiraharjo & Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Ub Press, 2019),75.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), 333-334.

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

Akad *qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *qard* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴

Secara kontekstual terdapat beberapa pengertian, diantaranya yaitu:

1. Menurut Madzhab Hanafi

Qard merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

2. Menurut Madzhab Maliki

Qard didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.⁵

3. Menurut Madzhab Hanbali

Qard adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.

⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 227.

⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab*, (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

4. Menurut Madzhab Shafi'i

Qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.⁶

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridl*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁷

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang

⁶ Ibid.,

⁷ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press),146.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka akad ini termasuk dalam akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringkankan beban orang lain dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Pemebrian hutang termasuk dalam kebaikan agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.⁹

Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, jadi didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan harta dapat membatalkan kontrak *qard*.

Namun didalam *qard* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak disyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan. Setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram atau riba.

⁸ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), 451.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

B. Dasar Hukum *Qard*

Hutang piutang sebagai sarana tolong menolong memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam. Diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: "siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak"¹⁰

2. Hadist Nabi

مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ صَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن حبان)

Artinya: "barang siapa memberi pinjaman hutang kepada seorang Muslim dua kali, maka ia mendapatkan pahala sedekah satu kali." (HR. Ibn Hibban)¹¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَيْلَةً أُسْرِي بِي الصَّدَقَةُ

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ: يَا حَبْرِي! مَا بَالُ الْقَرْضِ

أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضَ لَا

يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن حبان)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 41.

¹¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 100.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surga pada malam isra’ku, (pahala) sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan (pahala) memberikan pinjaman hutang dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya: wahai jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah ? jibril menjawab, karena orang yang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan.”(HR. Ibn Hibban)¹²

3. Ijma’

Bahwa semua kaum muslimin sepakat bahwa utang piutang diperbolehkan. Dan para ulama juga sepakat atas keabsahan akad *qard*. Ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesamanya.

Tidak ada seorangpun yang memiliki segala kebutuhan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.¹³

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia

¹² Ibn Majjah, *Sunnan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Darul Fikr,tt) 15.

¹³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, 335.

ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.¹⁴

4. *Qiyas*

Fuqaha berbeda pendapat mengenai hutang piutang, apakah tidak sesuai dengan *qiyas* atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih adalah oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim adalah bahwa hutang piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat), dan menjadi tujuan hutang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi juga pahala di akhirat.¹⁵

C. Struktur Akad *Qard*

Sebagaimana akad muamalah lainnya *qard* juga memiliki struktur akad yaitu rukun dan syarat suatu akad. Rukun yaitu suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada.¹⁶

Struktur akad *qard* terdapat empat rukun serta syaratnya yang meliputi:



¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

¹⁵ Abdullah, dkk, *Ensiklopedia*, 158.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1510.

1. *Muqridl*

Muqridl merupakan pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). *Muqridl* disyaratkan orang yang melakukan transaksi atas inisiatif sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, serta orang yang memiliki keahlian dalam *mentasharufkan* hartanya.¹⁷

Syarat bagi pemberi pinjaman adalah orang yang sah pembelanjanya (bukan anak kecil, bukan bukan orang yang kurang akalnya, dan bukan orang yang dihalangi untuk membelanjakan hartanya karena alasan-alasan tertentu). Syarat ini dikarenakan akad *qard* adalah akad memindahkan kepemilikan harta sehingga disyaratkan hal-hal tertentu sebagaimana juga disyaratkan juga dalam akad jual beli. Selain mempunyai kecakapan dalam melakukan transaksi, pemberi hutang juga disyaratkan mempunyai kewenangan melakukan *tabarru'* yang meliputi merdeka/bukan budak, baligh, berakal, dan sudah dewasa, dan juga atas kemauan sendiri.¹⁸

2. *Muqtaridl*

Muqtaridl merupakan pihak yang menerima pinjaman hutang. *Muqtaridl* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi, yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan *thasarufnya*.¹⁹

¹⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 101.

¹⁸ M. Pujiraharjo & Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, 78.

¹⁹ *Ibid.*,

Bagi penerima hutang hendaklah juga termasuk orang yang mampu membelanjakan hartanya, serta pihak yang dapat menerima tanggung jawab.

3. *Muqradl*

Muqradl yaitu objek akad *qard* yang disebut piutang. *Muqradl* disyaratkan sesuatu yang sah dijual belikan dan bisa dispesifikasikan. Untuk objek akad jika berupa barang maka disyaratkan dengan barang yang ada padanannya. Jadi boleh hutang piutang dengan bentuk barang, yang barang itu ada padanannya.

Harta yang boleh dijadikan objek akad *qard* harus harta yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Harta yang dipinjamkan haruslah harta milik *muqridl* karena sifat kepemilikannya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridl* menjadi milik *muqtaridl* sehingga *muqridl* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang dipinjamkan.²⁰

Harta yang diutangkan harus berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam satu jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang dihurtangkan juga harus berupa benda, tidak sah

²⁰ Ibid.,

menghutangkan manfaat (jasa). Serta harta yang dihutangkan harus diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

4. *Shighah*

Shighah dalam akad *qard* yaitu *ijab* dari pihak *muqridl* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabul* dari pihak *muqtaridl* yang menunjukkan persetujuan dari *ijab*.²¹

Shighah yaitu *ijab* dan *qabul*, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab* dan *qabul* itu sah dengan *lafadz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata: “aku memberimu utang atau aku mengutangimu.” Demikian pula *qabul* sah dengan *lafadz* yang menunjukkan kerelaan, seperti: “aku menerima atau aku berhutang.”²²

D. Konsekuensi Akad *Qard*

Setelah akad *qard* terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. Hak memiliki dan status akad

Menurut *qaul ashah*, *muqtaridl* berstatus memiliki atas *muqradl*, terhitung sejak penerimaan *muqradl*, sebagaimana dalam akad *hibbah*. Sebab, sejak penerimaan tersebut, *muqtaridl* telah memiliki otoritas untuk mentasarufkan *muqradl*.

Konsekuensi dari kepemilikan penerima pinjaman (*muqtaridl*) atas objek (*muqradl*) ini adalah hak pemberi pinjaman (*muqridl*) telah

²¹ Ibid.,

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, 334.

berpindah dari objek yang tertentu secara fisik pada penggantinya yang berada dalam tanggungannya penerima pinjaman.

Sedangkan menurut *muqabil ashah*, *muqtaridl* baru berstatus memiliki *muqradl* terhitung sejak ia mentasarufkan *muqradl* yang bisa menghilangkan dari kepemilikannya, seperti menjual, menghibahkan, mewaqafkan, atau tasaruf lainnya. Sebab, disamping dengan tasaruf demikian telah membuktikan adanya kepemilikan, sebelum *muqradl* ditasarufkan, baik *muqfidl* atau *muqtaridl*, masih berhak membatalkan akad *qard*. Dengan kata lain, sebelum *muqtaridl* membelanjakan *muqradl* yang bisa menghilangkan dari kepemilikannya, akad *qard* masih berstatus *ja'iz* dari kedua belah pihak, sehingga akad bisa dibatalkan oleh *muqridl* dengan cara menarik *muqradl*, atau dibatalkan oleh *muqtaridl* dengan cara mengembalikan *muqradl*.

2. Hutang bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qard* ada tiga. Yakni, syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid*, dan syarat *shahih*.²³

a. Syarat *fasid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqridl* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 104-105.

dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad sebab termasuk dalam riba *qard*, sebagaimana dalam hadist:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مِنْ وُجُوهِ رِبَا

Artinya:“Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba.” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah)²⁴

Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*, sebab spirit akad *qard* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong, sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.

b. Syarat *fasid* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtaridl* yang lebih besar. Menurut *qaul ashah*, klausul kedua ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan, sehingga tidak membatalkan akad *qard*.²⁵

Sebab, klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan *muqtaridl* lebih besar, bukan termasuk praktek memanfaatkan akad *qard* untuk kepentingan mencari keuntungan,

²⁴ Abu Bakar Ahmand Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 2 Hadist Ke 152 (Majelis Dairah Al-Muarif Al-Nhizamiyah 1334 H), 72.

²⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 106.

melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtaridl*, sehingga termasuk bentuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qard* itu sendiri yaitu tolong-menolong.

Sedangkan dalam persyaratan tempo, dalam madzhab syafi'iyah, klausul berupa persyaratan tempo dalam akad *qard*, termasuk *fasid* yang tidak *mufsid*. Syarat ini *fasid* karena syarat tempo merupakan unsur yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan *muqtaridl*. Sedangkan *qard* termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan sebagaimana jual beli barang ribawi. Namun syarat tempo ini tidak *mufsid*, dalam arti akad *qard* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqridl*, sebagaimana diatas.²⁶

Substansi akad *qard* adalah pemberian izin membelanjakan terhadap *muqradl* dengan sistem kewajiban mengembalikan ganti, sehingga akad *qard* merupakan sebab bagi *muqridl* untuk berhak secara langsung menuntut ganti *muqradl*. Artinya, begitu akad *qard* berlangsung, seketika itu juga pihak *muqridl* memiliki hak untuk menagih hutangnya.

Apabila disyaratkan tempo, maka syarat demikian tidak merubah hak tagih *muqridl* yang bersifat langsung menjadi tertempokan. Sebab penempoan demikian hanya sekedar bentuk kemurahan yang dijanjikan oleh *muqridl*, sedangkan memenuhi

²⁶ Ibid.,

janji, secara hukum tidak wajib. Sebab dianalogikan dengan akad *hibbah* sebelum serah terima yang tidak mengikat. Kedari demikian, secara yuridis hak tagih *muqridl* dalam akad *qard* bersifat langsung, namun secara etis, *muqridl* tidak diperkenankan menagih hutang selama *muqtaridl* dalam kondisi kesulitan.

Sedangkan menurut Imam Malik, syarat tempo dalam akad *qard* termasuk syarat shahih, baik di awal akad, seperti hutang dengan syarat dibayar tempo tertentu, atau di tengah akad, seperti hutang dengan pembayaran cash kemudian disyaratkan tempo.²⁷

c. Syarat *shahih*

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai, syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.²⁸

3. Sistem pembayaran

Sistem pembayaran hutang yang harus dilakukan *muqtaridl* adalah mengganti padanan *muqradl* apabila, *muqradl* berupa barang yang memiliki padanan. Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqradl*. Disamping itu, pembayaran

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid.,

demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqridl*.

Sedangkan apabila *muqradl* berupa barang yang tidak memiliki padanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya, seperti hutang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan, berdasarkan sebuah hadist riwayat muslim. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.

Yakni harga pada saat penerimaan *muqradl* jika, mengacu pada versi yang menyatakan, kepemilikan *muqtaridl* terhitung sejak penerimaan, dan harga tertinggi antara penerimaan hingga tasaruf jika, mengacu pada versi yang menyatakan kepemilikan terhitung sejak mentasarufkan *muqradl*. Seperti, hutang kambing dibayar dengan mata uang yang senilai dengan harganya.²⁹

Sistem pembayaran yang dilakukan dengan tempo diperbolehkan asalkan memang masih belum ada, namun apabila sudah mampu dan melakukan pembayaran tunda termasuk dalam kedzaliman. Bagi orang yang mampu membayar hutang tepat pada waktu yang ditentukan maka ia termasuk orang yang terpuji.

Sedangkan memberi kelebihan dalam mebayar hutang terdapat dua pendapat yaitu:

²⁹ Ibid.,

1. Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi hutang menerima kelebihan tersebut.

2. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terimakasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut hukumnya boleh (halal) bagi pemberi hutang untuk menerimanya.³⁰

E. Manfaat Akad *Qard*

Manfaat dari akad *qard* banyak sekali, diantaranya yaitu:

3. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
4. *Qard* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung unsur sosial, di samping misi komersial.
5. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.³¹

³⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015), 168.

³¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

6. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin.



BAB III

KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING DI

DESA BANARAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan umum Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan geografis

Desa Banaran merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Desa Banaran adalah 397,12 H. Desa Banaran sendiri terdiri dari empat dusun, yaitu:

- a. Dusun Krajan yang berbatasan dengan Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
- b. Dusun Sooro yang berbatasan dengan Desa Bekiring Kecamatan Pulung
- c. Dusun Tangkil yang beerbatasan dengan Desa Talon Kecamatan Ngebel
- d. Dusun Gondang Sari yang berbatasan dengan Desa Tambang Kecamatan Puduk¹

Desa Banaran terdiri dari 16 RW dan 48 RT, Desa Banaran terletak di sebelah timur Kota Ponorogo dengan jarak sekitar 31,6 kilo meter. Desa Banaran juga merupakan salah satu dataran tinggi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

¹ Data Kependudukan Desa Banaran Tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya mengenai Desa Banaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:²

Tabel 3.1

Luas wilayah Desa Banaran

Sawah	Tanah Kering	Perkebunan	Fasilitas Umum	Hutan	Jumlah
65 H	187,63 H	3 H	53,88 H	85,61 H	397,12 H

Sebagaimana Indonesia beriklim tropis maka Desa Banaran ini terdiri dari dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

2. Keadaan demografis

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Desa Banaran pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk mencapai 2138 jiwa. Untuk lebih tepatnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:³

Tabel 3.2

Banyaknya kepala keluarga dan penduduk menurut jenis kelamin

Desa	Kepala Keluarga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Banaran	714	1040	1098	2138

² Data Kependudukan Desa Banaran Tahun 2019.

³ Ibid.,

Sebagian besar masyarakat Desa Banaran bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Dilihat dari luasnya wilayah Desa Banaran yang sebagian besar adalah lahan pertanian dan juga banyaknya warga yang memiliki hewan peliharaan bahkan hampir setiap rumah.

3. Keadaan sosial ekonomi

Untuk keadaan sosial ekonomi Desa Banaran dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁴

Tabel 3.3
Keadaan mata pencaharian penduduk Desa Banaran

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	505 Orang
2.	Buruh Tani	3 Orang
3.	Pedagang	13 Orang
4.	Buruh Harian	6 Orang
5.	PNS	2 Orang
6.	Peternak	6 Orang
7.	Juru Masak	1 Orang
8.	Wiraswasta	429 Orang
9.	IRT	428 Orang
10.	Pelajar	315 Orang
11.	Tidak Bekerja	274 Orang

⁴ Data Kependudukan Desa Banaran Tahun 2019.

12.	Perangkat Desa	13 Orang
13.	Guru	7 Orang
14.	Bidan dan Perawat	2 Orang

Dilihat dari mata pencahariannya dan juga bangunan rumah yang rata-rata sudah baik, desa ini bisa digolongkan ke dalam perekonomian yang baik.

4. Keadaan sosial pendidikan

Untuk tingkat keadaan sosial pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁵

Tabel 3.4

Penduduk akhir tahun menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	691 Jiwa
2.	SMP / MTs	353 Jiwa
3.	SMA / SLTA	118 Jiwa
4.	Sarjana	31 Jiwa
5.	Tidak Sekolah	443 Jiwa

IAIN
PONOROGO

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Banaran masih kurang, dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang tidak bersekolah dan juga lulusan SD yaitu mencapai 1134 orang.

⁵ Data Kependudukan Desa Banaran Tahun 2019.

5. Keadaan sosial keagamaan

Penduduk yang ada di Desa Banaran mayoritas adalah pemeluk Agama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Banaran seperti jamaah yasin ibu-ibu dan bapak-bapak setiap malam jum'at serta kegiatan yang diadakan oleh pejabat setempat membuat semangat masyarakat untuk beribadah semakin kuat dan semakin bertambah. Yang tadinya mushola dan masjid sepi para jama'ah, dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid dan mushola dengan rutin semakin mnambah antusiasme masyarakat untuk beribadah, disamping dari dukungan dan partisipasi masyarakat yang semakin positif dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ditambah juga dengan adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di setiap mushola dan masjid yang ada di setiap dusun di Desa Banaran.⁶

Dari hal-hal diatas dapat dilihat bahwasannya kualitas keagamaan di Desa Banaran sudah bagus dengan menghidupkan kembali masjid dan mushola sehingga menambah semangat masyarakat untuk beribadah dan juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri maupun oleh pejabat setempat.

⁶ Observasi, Ponorogo 10 September 2020.

B. Akad pemodalannya dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat Desa Banaran mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dilihat dari letak geografisnya yang sebagian besar lahan masyarakat berupa sawah dan ladang. Juga dapat dilihat dari banyaknya warga yang memelihara hewan terutama kambing dan sapi, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai berkembang pula peternak ayam pedaging, yang mana akan menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini.

Semakin banyak peternak semakin banyak pula cara yang mereka gunakan dalam pemenuhan pemeliharaan hewan ternak tersebut, salah satunya yaitu dengan kerjasama satu dengan yang lainnya. Seperti yang terjadi saat ini yaitu kerjasama pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.⁸

Dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging ini terdapat mitra yaitu antara peternak ayam dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Kerjasama antara peternak Desa Banaran dengan PT.BAS ini berlangsung sejak bulan Agustus 2018, berarti hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. **IAIN P O N O R O G O**

Dalam kerja sama ini pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) maupun pihak peternakan sama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan ayam yang ada. Dan mereka juga sama-sama memberikan

⁷ Observasi, Ponorogo, 15 Agustus 2020.

⁸ Ibid.,

modal serta tenaga dalam kemitraan ini. Modal merupakan unsur yang utama dalam sebuah kemitraan. Hanya dalam kemitraan ini jumlah modal yang dikeluarkan berbeda jumlah antara pihak yang bermitra, dan juga tenaga yang dikeluarkan berbeda dari dua pihak yang bermitra. Modal dari peternak ayam berupa bangunan kandang dengan segala fasilitasnya. Sedangkan pihak PT, modalnya berupa obat, bibit ayam, vaksin dan pakan ayam. Sebagaimana keterangan dari bapak Jaenuri selaku pemilik peternakan:

“ya, pasti dalam kerjasama pasti ada unsur modal dan kerja *mbak*. Dalam kerjasama jual beli ini modal yang dikeluarkan diawal cukup banyak *mbak*. Misal *e* saya sebagai peternak modal *e* diawal cukup banyak *mbak* kandang peternakan *iku ae* kalau diuangkan sudah mencapai *150 juta*, belum lagi tiap bulannya atau selama masa pemeliharaan ayam ada gas, listrik, dan upah bagi yang membantu merawat ayam itu mencapai *4 jt lebih mbak*. Sedangkan PT.BAS mengeluarkan jumlah modal yaitu meliputi bibit ayam, pakan, obat serta vaksin yang mencapai *182 jt lebih mbak*.⁹

Jika dihitung secara matematis akan terdapat besaran modal yang berbeda jauh antara modal yang berasal dari PT dan modal yang berasal dari peternak. Dari peternak hanya mengeluarkan biaya pembuatan kandang beserta wadah pakan dan minum ayam yaitu Rp. 150.000.000,-, dan biaya operasional meliputi listrik, gas, senilai Rp. 2.200.000 serta biaya untuk upah pekerja yang membantu merawat ayam hingga panen yaitu Rp.2.000.000,-, sehingga total modal dari peternak ayam adalah Rp. 154.200.000,-.

⁹ Jaenuri (Pemilik Peternakan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Agustus 2020.

Namun hal ini terjadi pada bulan pertama setelah kandang resmi beroperasi, ketika memasuki bulan kedua ketiga dan bulan-bulan selanjutnya maka modal yang dikeluarkan peternak hanya meliputi gas dan listrik senilai Rp.2.200.000,- dan juga biaya upah bagi para pekerja yang membantu perawatan ayam selama menunggu waktu panen yaitu Rp.2.000.000,-, sehingga total pengeluaran perbulan yaitu Rp.4.200.000,-. Sedangkan pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) mengeluarkan modal cukup besar antara lain yaitu, bibit ayam 4500 ekor ayam x Rp.6.600 = Rp.29.700.000,-, obat, vaksin senilai Rp. 3.000.000,- dan juga pakan ayam sekitar 298 karung senilai Rp.149.655.000,-, sehingga total modal dari PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) adalah Rp.182.355.000,-.

Dan modal ini akan terus berlangsung selama masa kontrak belum berakhir atau setiap bulannya. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal modal diantara kedua belah pihak yang bermitra. Adapun selama kerja sama berlangsung porsi kerja dari masing-masing pihak berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Anik Susilowati:

“selama kerjasama porsi kerjane juga beda mbak. Kalau dari pihak saya porsi kerjanya yha setiap hari, mulai dari merawat ayam hingga panen, membeni pakan, membersihkan kandang, memastikan ayam dalam kondisi yang baik. Sedangkan porsi kerja untuk pihak PT.BAS yaitu mereka mendatangkan PL mbak. PL itu tugasnya memberikan kita (peterenak) arahan-arahan mengenai perawatan ayam, survei dll. Namun untuk survei sudah jarang mbak dilakukan, karena mereka sudah percaya pada kita, tapi jika suatu waktu mereka dibutuhkan kapan pun mereka siap untuk datang mbak”.¹⁰

¹⁰ Anik Susilowati (Pemilik Peternakan), Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Juni 2020.

Adapun selama proses kerjasama berlangsung, dari pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) terdapat perwakilan yang akan melakukan survei. Perwakilan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) untuk melakukan survei biasa dinamakan PL atau Pengawas Lapangan. Hal ini untuk menjaga komunikasi antara PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) dan peternak, sehingga hal sekecil apapun yang terjadi dalam proses pemeliharaan ayam pedaging tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Namun untuk rutinitas survei sudah jarang dilakukan pada tahun 2020 ini karena pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) sudah mempercayai peternak, namun apabila dibutuhkan sewaktu-waktu maka pihak PL akan datang.¹¹

Sehingga bisa dikatakan bahwa porsi kerjasama antara PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) dan peternak tidak sama, karena dari PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) hanya akan melakukan pengelolaan dalam arti sesekali saja, sedangkan dari peternak ayam pedaging akan mengelola usaha tersebut setiap hari.¹²

C. Tata cara penghitungan nilai modal dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Mengenai mekanisme penghitungan nilai modal adalah tergantung dengan kebijakan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Narsih selaku pemilik peternakan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung menjelaskan bahwa:

¹¹ Observasi, Ponorogo, 15 Agustus 2020.

¹² Ibid.,

“untuk penghitungan modal seluruhnya akan dihitung diakhir *mbak*, karena bisa jadi lebih bisa jadi kurang mengenai pengeluaran yang diperlukan selama proses perawatan. Akan tetapi yang jelas yang menjadi keuntungan saya adalah total hasil penjualan ayam pedaging dikurangi dengan total pengeluaran yang dilakukan oleh PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Jika hasil panen melebihi standart ukuran PT maka saya akan untung, namun apabila hasil panen berada di bawah standatr PT sudah jelas bisa dikatakan saya merugi. *Tapi* jika dipasaran harga ayam tinggi saya masih bisa mendapat keuntungan 30% dari selisih hasil penjualan pihak PT *mbak*.”¹³

Jadi bisa diketahui bahwa keuntungan peternak adalah sisa perolehan penjualan ayam pedaging secara keseluruhan dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak PT. Keuntungan bisa dicapai ketika hasil penjualan melebihi standart yang ditentukan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa).

Dan peternak akan mengalami kerugian apabila hasil penjualan berada di bawah standart PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Misalnya pada bulan juli total hasil penjualan adalah Rp.200.000.000,- dan total keseluruhan sapronak (bibit, pakan, obat dan vaksin) sebesar Rp.182.355.000,-, maka selisih sebesar Rp.17.645.000,-, merupakan keuntungan kotor bagi peternak.

Serta akan menjadi keuntungan bersih peternak setelah dikurangi dengan biaya perawatan selama satu bulan atau satu periode panen. Sehingga keuntungan bersih bagi peternak yaitu Rp.17.645.000,- dikurangi dengan Rp.4.200.000,- sehingga totalnya keuntungannya adalah sebesar Rp.13.445.000,-.

¹³ Narsih (Pemilik Peternakan), *Hasil Wawancara*, 25 juni 2020.

Namun keuntungan peternak dapat bertambah jika harga penjualan ayam dipasaran sedang tinggi, maka pihak peternak mendapat bagian 30% dari selisih seluruh hasil penjualan PT.BAS.¹⁴

Adapun keuntungan yang diterima oleh pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) adalah selisih antara pengeluaran dalam akad kerjasama, harga pembelian ayam dari peternak dengan harga jual ayam di pasaran.¹⁵ Sedangkan apabila terjadi resiko dalam akad kerjasama ini, maka juga terdapat bentuk pertanggung jawaban dari masing-masing pihak.

Sedangkan bentuk risiko dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging ini adalah ketika ada ayam pedaging yang mati ataupun terserang penyakit. Di dalam proses perawatan ataupun pemeliharaan ayam pedaging tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ayam mati antara lain adalah faktor alam atau cuaca. Keadaan cuaca yang sekarang tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup ayam pedaging yang masih berusia antara 1-14 hari.

Jika ayam banyak yang mati maka akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari penjualan atau panen ayam pedaging tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak katemun yang menjelaskan bahwa: “ ayam yang masih muda atau kisaran 2 minggu itu masih rentan terserang penyakit bahkan bisa berujung pada kematian ayam. Dan ayam mati itu akan menimbulkan kerugian bagi pak Lani sebagai peternak,

¹⁴ Observasi, Ponorogo 16 Agustus 2020.

¹⁵ Ibid.,

karena akan sangat berpengaruh pada hasil panen yang otomatis akan berimbas pada keuntungan peternak.”¹⁶

Meskipun pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Sudah menyiapkan obat dan vaksin untuk menanggulangi atau mengantisipasi apabila terjadi resiko kematian akibat penyakit ayam, tetapi faktor alam lebih kuat sehingga masih banyak ayam pedaging yang mati karena penyakit maupun stres. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak katemun bahwa:

“untuk obat dan vaksin PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). sudah menyiapkan tapi ya bagaimana lagi, alam lebih berpengaruh. Misalnya saja ayam itu stres maka kemungkinan untuk hidup juga sedikit. Dengan cuaca yang tidak menentu, kadang dingin sekali, kadang panas sekali itu juga kan berpengaruh pada kehidupan ayam, apalagi yang masih muda-muda sekitar 2 minggunan.”¹⁷

Jadi dalam pemeliharaan ayam pedaging ini harus benar-benar di jaga kondisi lingkungan sekitar kandang ayam, kebersihan kandang ayam, dan pemberian vaksin yang harus dilakukan secara berkala agar ayam-ayam tersebut terhindar dari berbagai macam penyakit, untuk meminimalisir risiko atau kerugian di akhir.

maka penanggung jawab adalah sesuai kesepakatan di awal yaitu, apabila banyaknya ayam yang mati melebihi 10% maka akan ditindak lanjuti mengenai penyebab matinya ayam-ayam tersebut sebelum waktu panen. Namun apabila banyaknya ayam yang mati di bawah 10% maka itu adalah mutlak bagian kerugian adalah PT.BAS sebagai pemilik modal

¹⁶ Katemun (Pekerja Peternakan) *Hasil Wawancara*, 12 Juni 2020.

¹⁷ Ibid.,

terbesar.¹⁸ Seperti yang diungkapkan bapak Samani selaku pemilik peternakan:

*“yha kalo untuk kerugian itu karena ayam mati sebelum waktu panen tiba. Jadi gini, semisal ayam mati dibawah 10% itu menjadi bagian kerugian dari PT mbak. Karena mereka sebagai pemegang modal terbanyak setiap periodenya. Tapi jika ayam mati itu di atas 10% maka akan ditindak lanjuti, siapa yang bersalah atau alasan kenapa banyak ayam mati sebelum masa panen tiba, karena factor cuaca atau memang karena kelalaian dari peternak.”*¹⁹

Begitu pula ketika panen jumlah total hasil penjualan adalah berada di bawah standart penjualan atau total hasil penjualan di kurangi biaya yang dikeluarkan oleh PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) dan hasilnya adalah kurang dari total pengeluaran PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa), maka pihak peternak tidak mendapat apapun. Begitu pula ketika hasil total penjualan di kurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) sama persis maka pihak peternak juga tidak mendapat bagian apapun. Seperti yang diungkapkan Bapak Samani: *“gini mbak kalo pas panen, ternyata hasil penjualan itu di bawah standart penjualan, atau ketika dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan PT.BAS selama satu periode itu kurang atau pas, maka itu saya sebagai peternak tidak mendapat apapun, bisa dikatakan rugi saya.”*²⁰

¹⁸ Observasi, Ponorogo, 17 juni 2020.

¹⁹ Samani, *Hasil Wawancara*, 25 Juni 2020.

²⁰ Ibid.,

D. Syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dalam pemeliharaan ayam pedaging ini para peternak yang ada di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah terikat kontrak dengan PT. BAS yang ada di Madiun. Dalam kerjasama ini pihak PT. BAS yang memberikan pinjaman modal namun berupa barang seperti bibit ayam, pakan, obat, dan vaksin, akan tetapi dengan syarat apabila ketika ayam-ayam tersebut tiba waktunya panen maka, hasilnya harus dijual kembali pada pihak PT. BAS. Seperti yang dikatakan Bapak Samsul selaku perwakilan dari PT.BAS: “pada kerjasama ini PT.BAS selaku pemilik modal atau pemberi modal akan tetapi tidak berupa uang, langsung *dirupakan* barang. Seperti bibit ayam. Pakan, obat, dan vaksin. Tetapi dengan syarat ketika nanti panen, hasilnya harus dijual kembali pada PT.BAS”²¹

Penjualan hasil panen pemeliharaan ayam pedaging tersebut juga masuk dalam kontrak, yang mana ayam-ayam tersebut dihargai dengan harga Rp.18.600,- per kgnya. Dalam kontrak tersebut juga para peternak tidak diperkenankan untuk menjual hasil panennya kepada pihak lain di luar PT.BAS. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sipur selaku pemilik peternakan di Desa Banaran:

“*kalo* untuk panen ayam harus kembali pada PT, sudah termasuk dalam kontrak harganya. Dihargai dengan harga Rp.18.600,-, kita tidak diperkenankan untuk menjual dipihak lain, *yha* karena sudah terikat kontrak itu. Meskipun kita tidak terikat kontrak itu, kita

²¹ Samsul (Pengawas Lapangan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo: 26 Juni 2020.

menjual dipasar pun harganya juga sama, selisih hanya Rp.500,- hingga Rp1.000,- maka kita lebih baik *yha* menjual hasilnya pada PT, langsung *mbak tidak perlu ribet dan repot. Kalo* kita menjual pada pihak lain pun kita sendiri *mbak* yang repot karena harus mengantar ke tempat mereka (para pembeli) sedangkan *kalo* PT mereka akan datang sendiri kemari”²²

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, selain dari kontrak para peternak juga tidak berkenan menjual hasil panen pada pihak lain, karena menghindari kesusahan. Karena meskipun dijual diluar pihak PT.BAS harga akan sama selisih hanya sekitar Rp.500,- hingga Rp.1.000,- saja, maka pihak peternak memilih yang lebih praktis. Dan apabila pihak peternak menjual hasilnya pada pihak lain maka mereka juga harus mengantar sampai ketempat para pembeli yang mana juga harus mengeluarkan biaya lagi, sebagai biaya akomodasinya.



²² Sipur (Pemilik Peternakan) Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2020.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM PEDAGING DI DESA BANARAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pemodalannya dalam pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam pemeliharaan ayam pedaging yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdapat mitra kerja atau sistem kerja bermitra yaitu dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa). Dalam kemitraan ini PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) bertindak sebagai penyedia sapronak atau yang meliputi bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat-obatan, serta penyedia tim untuk survei yang biasa disebut PL. PL bertugas untuk memberikan pengarahan dan bantuan kepada peternak ayam pedaging agar hasil panennya bagus.¹

Dalam sekali putaran modal yang dikeluarkan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) yaitu meliputi bibit ayam, obat dan vaksin, serta pakan dengan jumlah modal yaitu Rp.182.355.000,-, dan modal ini akan terus berlangsung selama masa kontrak belum berakhir atau setiap bulannya.²

¹ Observasi, Ponorogo, 20 Agustus 2020.

² Ibid.,

Sedangkan untuk peternak modal yang dikeluarkan adalah kandang beserta isinya, biaya operasional kandang perbulan meliputi gas, listrik, upah pekerja yang membantu perawatan ayam hingga tiba masa panen yaitu senilai Rp.154.200.000. Namun modal tersebut adalah hanya diawal atau bulan pertama setelah kandang resmi beroperasi, dan untuk bulan-bulan berikutnya modal yang dikeluarkan peternak adalah untuk biaya operasional kandang dan juga upah pekerja yang membantu merawat ayam hingga ayam siap panen yaitu senilai Rp.4.200.000,-.³

Menurut Imam Syafi'i, *qard* merupakan pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan pada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.

Menurut Madzhab Hanafi, *qard* adalah harta yang yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. *Mitsli* adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Misalnya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain *mitsli* seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.

Sehingga bentuk akad pemodalan dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging ini adalah sah, karena yang dijadikan objek atau dipiutangkan jelas, dapat dispesifikasikan, dan dapat dihitung . Dalam akad ini juga terdapat kemanfaatan dalam hutang piutangnya, yaitu pihak

³ Observasi, Ponorogo, 20 Agustus 2020.

PT.BAS, memberikan bantuan berupa modal kepada peternak agar dapat menjalankan bisnisnya.

Sehingga terdapat pula unsur kemaslahatan. Meskipun dengan jumlah yang berbeda antara peternak dan PT dalam hal modal maupun tenaga kerja, akan tetapi terdapat kerelaan kedua belah pihak menyangkut kerjasama tersebut, serta telah memenuhi unsur-unsur akad *qard* yaitu 2 orang yang berakad, objek yang diakadkan jelas, serta pernyataan yang sah mengenai hutang piutang tersebut juga jelas.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penghitungan nilai modal pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Sistem penghitungan nilai modal dalam kerjasama ini adalah total penjualan hasil panen ayam pedaging yang dikurangi dengan total sapronak seperti pakan, bibit, obat dan vaksin sehingga selisih dari itu akan menjadi keuntungan kotor bagi peternak. Keuntungan bersih akan di dapat jika nilai tersebut sudah dikurangi dengan biaya operasional dari pihak peternak. Misalnya saja pada bulan juni hasil panen mencapai Rp.200.000.000,-, dikurangi dengan nilai sapronak sebesar Rp.182.355.000,- maka keuntungan kotor peternak sebesar Rp.17.645.000,-, dan akan menjadi keuntungan bersih jika dikurangi dengan biaya operasional peternak sebesar Rp.4.200.000,-, maka keuntungan bersih peternak sebesar Rp.13.445.000,-.⁴

⁴ Observasi, Ponorogo, 20 Juni 2020.

Sedangkan bagian keuntungan pihak pabrik adalah selisih harga jual antara modal awal peternak seperti sapronak dengan harga pembelian dari peternak dengan harga ayam di pasar. Misalnya saja harga jual ayam dari peternak per kg/ekor adalah Rp.18.600,- sedangkan harga ayam dipasar per kg/ekornya adalah Rp.21.000,- maka selisih Rp.2.400,- per kg/ekor menjadi keuntungan dari pihak PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa).⁵

Mengenai pembagian keuntungan tidak diketahui diawal kontrak perjanjian dan kadar prosentase keuntungan setiap pihak juga tidak diketahui. Proporsi keuntungan yang ditentukan dalam bentuk rupiah yang hanya akan diketahui diakhir kontrak yakni pada saat panen ayam pedaging kurang lebih setelah 35 hari dari awal kontrak, karena waktu tersebut adalah masa pemeliharaan ayam hingga ayam siap panen.⁶

Sedangkan dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa pengembalian jumlah hutang harus sesuai dengan yang dihutang tidak lebih dan tidak pula kurang. Hal tersebut memperjelas dasar kontrak *qard*. Sedangkan untuk keuntungan setiap mitra harus sesuai bagian atau proporsional dari jumlah modal yang dikeluarkan. Seorang tidak dibenarkan menentukan keuntungan diawal kontrak, karena dapat melanggar prinsip keadilan.⁷

Modal dan kerja merupakan alasan pokok yang memberikan hak kepada salah seorang mitra untuk mendapat keuntungan, dengan imbalan yang sebanding dengan kualitas kerja dan keterampilan pribadi. Sehingga,

⁵ Jaenuri, *Hasil wawancara*, 12 juni 2020.

⁶ Observasi, Ponorogo, 20 Juni 2020.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Maumalah Disqursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 201.

bagian keuntungan yang lebih besar diserahkan kepada investor dengan modal yang lebih kecil adalah tidak dibenarkan baik atas dasar modal ataupun kerja yang disumbangkan. Jika semua mitra menyumbangkan modal sekaligus kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang disepakati bersama adalah sah.⁸

Segaimana juga dikutip dalam KHES pasal 173 ayat (2) “pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.”⁹

Sistem pembayaran hutang yang harus dilakukan *muqtaridl* adalah mengganti padanan *muqradl* apabila, *muqradl* berupa barang yang memiliki padanan. Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqradl*. Disamping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqridl*.

Sedangkan apabila *muqradl* berupa barang yang tidak memiliki padanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya, seperti hutang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan, berdasarkan sebuah hadist riwayat muslim. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya. Yakni harga pada saat penerimaan *muqradl* jika, mengacu pada versi yang menyatakan, kepemilikan *muqtaridl* terhitung sejak

⁸ Abraham I. Udovich, *Kerja Sama Syari'ah Dan Bagi Untung Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori Dan Penerapannya* (Kediri: Qubah, 2008) 176-177.

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 103.

penerimaan, dan harga tertinggi antara penerimaan hingga tasaruf jika, mengacu pada versi yang menyatakan kepemilikan terhitung sejak mentasarufkan *muqradl*. Seperti, hutang kambing dibayar dengan mata uang yang senilai dengan harganya.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata cara pengembalian modal yang dilakukan peternak kepada PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) adalah sah menurut hukum Islam karena dalam pengembalian hutang tidak dikurangi ataupun dlebihkan, meskipun dengan pembayaran tempo yaitu menunggu hingga waktu panen tiba.

Hakikat *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, jadi didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan harta dapat membatalkan kontrak *qard*. Setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram atau riba.

Sehingga, tata cara pengembalian modal yang dilakukan oleh PT.BAS sendiri juga sudah sesuai yaitu, dengan mengambil sejumlah modal yang mereka tanam tidak melebihi dan tidak pula mengurangi. Yang mana modal tersebut akan terus bergulir hingga selesai akad *Qard* yang mereka lakukan.

¹⁰ Ibid.,

C. Tinjauan hukum Islam terhadap syarat penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Di dalam kontrak perjanjian antara peternak dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu salah satunya mengenai adanya syarat khusus perihal penjualan hasil pemeliharaan ayam pedaging. Yang mana syarat tersebut adalah mengharuskan para peternak untuk menjual kembali hasil panennya kepada PT.¹¹

Sedangkan dalam Islam secara umum syarat akad *qard* ada 3,yaitu:

1. Syarat *fasid* yang *mufsid*

Syarat *fasid* yang *mufsid* yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqridl* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk dalam riba *qard*. Sebagaimana dikatakan bahwa: “setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba.”¹²

Disamping itu, klausul ini juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*, sebab spirit akad akan kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.¹³

2. Syarat *fasid* yang tidak *mufsid*

¹¹ Observasi, Ponorogo, 25 Juli 2020.

¹² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, 105.

¹³ *Ibid.*,

Syarat *fasid* yang tidak *mufsid* yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan *muqtaridl* lebih besar.

3. Syarat *shahih*

Syarat *shahih* yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai, syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab, dll. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.¹⁴

Sehingga dalam kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini sudah sah menurut hukum Islam. Karena dalam akad ini kerjasama antara PT.BAS dengan peternak sudah sesuai dengan prinsip *qard*, meskipun terdapat klausul yang disyaratkan peternak menjual kembali hasil panennya kepada PT.BAS, namun dalam klausul ini tidak menguntungkan salah satu pihak, atau tidak ada pihak yang merasa untung lebih sehingga kerjasama pemeliharaan ayam ini sah sesuai dengan hukum Islam.

¹⁴ Ibid.,

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad pemodalan dalam pemeliharaan ayam pedaging antara peternak ayam Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) adalah sah menurut hukum Islam, karena unsur atau rukun serta syarat dalam *qard* sudah terpenuhi yaitu 2 orang yang berakad yaitu peternak dan juga PT.BAS sebagai mitra, objeknya juga jelas, kalimatnya atau *shighah* juga jelas.
2. Tata cara penghitungan modal yang dilakukan oleh PT.BAS, sudah sah sesuai dengan hukum Islam, karena PT.BAS dalam mengambil kembali modal yang mereka pinjamkan sesuai dengan aslinya. Dalam pengembalian modal peternak menunda hingga waktu panen tiba, dan diambil langsung oleh pihak PT.BAS, dengan cara mengambil hasil panen ayam sesuai dengan modal yang mereka tanam diawal, tidak melebihi tidak pula mengurangi. Sehingga dalam kerjasama ini tidak terdapat unsur riba.

3. pada pola syarat penjualan hasil panen yang dilakukan oleh PT.BAS, dengan petrenak di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sudah sah sesuai dengan hukum Islam. Yang mana syarat tersebut yang mengharuskan peternak menjual kembali hasil panennya pada pihak PT.BAS, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kontrak yang mereka lakukan dan juga atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan. Dan dengan terdapatnya syarat ini tidak pula mengandung akad riba atau menguntungkan salah satu pihak saja.

B. SARAN

Diharapkan bagi peternak dan PT.BAS (Brantas Abadi Sentosa) melakukan akad kerjasama tidak saling mengingkari kontrak satu sama lain, supaya kemitraan ini bisa berlangsung lama dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Khususnya bagi peternak diharapkan dapat menjalankan kemitraan dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga kerjasama ini akan berlangsung lama, dan dengan adanya kemitraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan untuk PT.BAS, diharapkan dapat terus menerapkan prinsip dasar hukum Islam, khususnya dalam menjalankan fungsi serta peran dalam usahanya. Diharapkan dapat terus melakukan survei atau

pengawasan kepada peternak, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada peternak dapat berjalan sebaik-baiknya.



Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan Bandung*: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Kudus : Meanara Kudus, 2017.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadmedia Group, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Chapra, Muhammad Umer, *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikh Muamalah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Semiawan, Conny r. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Udovich, Abraham I. *Kerja Sama Syari'ah Dan Bagi Untung Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori Dan Penerapannya*. Kediri: Qubah, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Economics And Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Hasanudin, Maulana Dan mubarak, Jiah. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Subekti, R & Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1992
- Khumedi, A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Lampung: Permatanet, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus metodologis konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: PP Al-Falah Ploso Kediri, 2013.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Pujiraharjo, M & Faizin Muhith, Nur. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Manan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: PP Al-Falah Ploso Kediri, 2013.

Syafi'i Antoni, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: Cordoba, 2018.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Mahardika, Cokorda Bagus Dharma Putra “*Pemberdayaan Peternak Ayam Ras Pedaging Sistem Kemitraan Dengan Penguatan Komitmen Kerjasama Inti-Plasma*” Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Sinollah “*model pola kemitraan usaha peternakan ayam pedaging di kabupaten malang*” *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol.11 No.3 Juli 2011.

Alhasani, Ahmad Syahr “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus Di Pt Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Dengan Peternak Plasma)*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) 2018.

Ningsih, Tri Ayu Wahyu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*” Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) 2018.

Referensi Internet:

Pengusaha muslim,- syirkah dan hukum-hukumnya kerjasama modal dikutip dari: <https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-danhukum-hukumnya-kerjasama-modal.html> [diunduh tanggal 25 agustus 2020]

arie syantoso,- konsep syirkah kerjasama usaha modal dikutip dari: <https://Ariesyantoso.Wordpress.Com/2012/07/07/Konsep-Syirkah-Kerjasama-Usahamodal/Aoh>, [diunduh tanggal 25 Agustus 2020]

Referensi Wawancara:

Katemun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2020

Anik Sulistyowati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juni 2020

Narsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juni 2020

Samani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juni 2020

Samsul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2020

Sipur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2020

Jaenuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Agustus 2020

